

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN

PROFIL HUMAS POLDA JAWA TENGAH

2.1 Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian dengan judul “*Strategi Humas Polda Jabar dalam menjalankan Aktivitas Public Relations (Studi Deskriptif Program Duta Desa Humas Polda Jawa Barat)*” yang ditulis oleh Muhammad Adhi Santika, Charisma A. Fitrananda (2023). Temuan dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Humas Polda Jawa Barat telah menerapkan Excellence Theoy, terutama dalam menjalankan program *Duta Desa (DeDe) Humas Polda Jabar*. Persamaan dengan penelitian ini dalam metode penelitian yakni metode kualitatif dan teori yang digunakan yaitu *Excellence Theory*. Perbedaannya, bahwa penulis menggunakan *Excellence Theory* untuk menganalisis strategi komunikasi internal sedangkan penelitian tersebut menganalisis *eksternal public relations*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat Asri (2018) yang berjudul “*Strategi Komunikasi Humas D.I.Yogyakarta melalui Skill Digital Savy di Era Disruptif*”. Hasil penelitian ini bahwa Humas Polda D.I. Yogyakarta telah menerapkan strategi komunikasi berbasis digital untuk menjangkau masyarakat secara lebih efektif dan efisien. Strategi ini mencakup pengelolaan komunikasi internal melalui WhatsApp, pelatihan pengelolaan media dengan memanfaatkan kanal digital aktif seperti

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan website resmi. Persamaannya terdapat pada metode penelitian serta teknik pengumpulan data yang digunakan. Perbedaannya terdapat pada subjek penelitian yang dilakukan di Polda D.I.Yogyakarta sedangkan pada penelitian ini dilakukan di Polda Jawa Tengah..

Ketiga, penelitian terdahulu dilakukan oleh Rozalia, Fitriany Oedi Erawan dan Kadek Dristiana Dwivayani (2020) dengan judul “*Strategi Humas Polisi Resort Kota Samarinda dan Menangani Berita Hoax di Samarinda*”. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Humas Polresta Samarinda mempunyai peran yang strategis dalam menangani berita hoax menjelang Pemilu 2024. Persamaannya terdapat dalam metode penelitian dan subjek penelitian, dimana penelitian ini juga sama dilakukan di instansi kepolisian.

Keempat, penelitian dengan judul “*STRATEGI KOMUNIKASI INTERNAL DALAM PERUBAHAN ORGANISASI DI MASA TRANSISI 2019-2020*” yang ditulis oleh Karlina Gusmarani dan Rajiyem (2022). Fokus utamanya adalah bagaimana komunikasi internal tersebut berlangsung antara manajemen dengan organisasi dilakukan dalam menghadapi suatu perubahan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Persamaan dengan penelitian ini yaitu metode penelitian dan pembahasan mengenai strategi komunikasi internal. Perbedaan penelitian terdapat pada subjek penelitian yaitu dalam organisasi dan instansi kepolisian.

Kelima, penelitian dengan judul “*MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN PILKADA SERENTAK 2024 MELALUI FORUM SILATURAHMI KAMTIBMAS*” yang ditulis oleh Imron Rosyadi Hamid, Rr. Hesti Setyodyah Lestari, Sinollah (2024). Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana sinergi antara Polri, masyarakat, dan stakeholder dapat menciptakan lingkungan yang kondusif, mencegah konflik, serta memastikan pelaksanaan Pilkada 2024 yang aman dan damai. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji efektivitas strategi yang diterapkan oleh Polres Malang dalam mengantisipasi potensi permasalahan keamanan selama proses Pilkada 2024. Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada metode penelitian yakni penulis menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian terdahulu menggunakan Metodi yuridis normative. Persamaan penelitian terdapat pada subjek penelitian yang dilakukan di instansi kepolisian.

2.2 Landasan Teori

2.2.1. Excellence Theory

Excellence Theory merupakan salah satu model dalam komunikasi organisasi dan *public relations*. *Excellence Theory* dicetuskan oleh James E. Grunig bersama koleganya, David M. Dozier, Larissa A. Grunig, dan William P. Ehling, dalam penelitian yang berlangsung selama lebih dari 15 tahun. Teori ini pertama kali diperkenalkan dalam buku "*Excellence in Public Relations and*

Communication Management" (Grunig, 1992) dan kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam *"Excellent Public Relations and Effective Organizations"* (Grunig & Dozier, 2002). *Excellence Theory* menjabarkan bagaimana humas menjadi bagian yang memiliki fungsi dapat berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas kerja organisasi. Bahwa komunikasi yang efektif dalam organisasi harus berorientasi pada komunikasi dua arah yang simetris guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan. *Excellence Theory* adalah teori yang menjelaskan kaitan antara peran Humas dalam manajerial serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan lebih efektif (Yuzri, 2017). Teori ini ditemukan dari hasil studi selama 15 tahun tentang manajemen komunikasi serta dari tiga buah buku yang diterbitkan tentang penelitian ini. (J.E.Grunig,2002; Doziel et al,1995; L.A Grunig dkk, 2002)

Excellence Theory ini dihasilkan dari penggabungan teori hubungan masyarakat yang meliputi teori komunikasi publik, manajemen strategis, peran hubungan masyarakat, model hubungan masyarakat, evaluasi hubungan masyarakat, etika dan *public relations*. Teori ini juga telah diuji melalui penelitian dengan narasumber CEO, Kepala Bagian Humas dan serta karyawan di 327 organisasi di beberapa negara seperti Inggris, Kanada, Amerika Serikat melalui metode wawancara kualitatif kepada narasumber.

Excellence Theory ialah fungsi yang berdampak dalam meningkatkan efektifitas kerja dalam sebuah organisasi. (Grunig, Grunig & Dozier, 2000:307). Sesuai dengan teori, agar tujuan lebih efektif, Humas sebisa mungkin harus dapat memecahkan masalah dan memenuhi tujuan baik organisasi maupun pemangku kepentingan yang ikut terlibat didalamnya.

Excellence Theory juga menjabarkan bagaimana suatu organisasi dapat mencapai *excellence communication* dan dapat menjadikan hubungan baik dengan internal maupun eksternal dalam mengelola segala kegiatan komunikasi di dalam sebuah organisasi (Hon & Grunig, 1999:12). Keberhasilan tentunya bisa dicapai melalui peran humas yang optimal dan berbagai strategi yang dilakukan.

Tabel 2.1 Model Excellence Theory

Model	Tipe Komunikasi	Karakteristik
<i>Press agency aytai</i> <i>Publicity</i>	Komunikasi satu arah	Menggunakan teknik persuasi untuk mengajak publik agar dapat bersama mencapai tujuan sebuah organisasi
<i>Public Information</i>	Komunikasi satu arah	Merupakan komunikasi yang bertugas menginformasikan

		aktivitas organisasi kepada publiknya.
<i>Two way asymmetric</i>	Komunikasi dua arah	Adanya <i>feedback</i> yang digunakan untuk memberikan pesan atau informasi serta mengajak stakeholder untuk berperilaku sesuai dengan visi misi organisasi.
<i>Two way symmetric</i>	Komunikasi dua arah	Berorientasi dalam terbentuknya hubungan jangka panjang dengan public atau stakeholder untuk selalu berpartisipasi supaya tercapainya pengertian bersama.

Menurut Grunig (Suharyanti,2014). Humas dapat dikatakan telah memaksimalkan nilai apabila memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

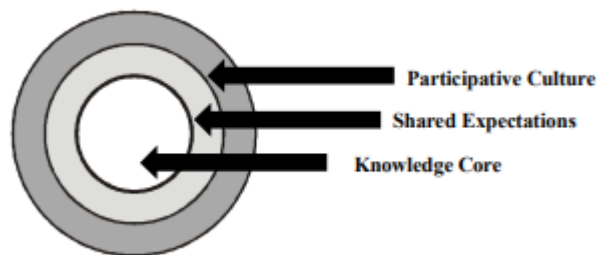
1. Adanya keterlibatan peran Humas dalam manajemen strategis

2. Pembagian beberapa bagian dalam Bidang Humas sangat diperlukan supaya dapat lebih mudah mengelola hubungan dengan masing-masing stakeholder secara tersistematika.
3. Humas harus mampu menerapkan komunikasi simetris dengan stakeholder dan publik agar antara pimpinan dan pihak yang berkaitan dapat berkomunikasi dengan baik.
4. Setiap unsur yang terlibat dapat berperan menjadi manajerial tanpa adanya perbedaan.

Di dalam *Excellence Theory*, kegiatan kehumasan beserta nilai dalam suatu organisasi dapat ditentukan dari kemampuan Humas dalam mencapai komunikasi dua arah simetris (*two way symmetric*) dan hasil komunikasi itu dapat berorientasi jangka panjang (Suharyati,2012). Yang artinya, penerapan *Excellence Theory* idealnya yakni diimplementasikan dalam sebuah organisasi. Dimana strategi komunikasi yang berbentuk internal maupun eksternal yang dilakukan, berorientasi terhadap keseimbangan dan seluruh pihak yang ikut berkomunikasi memiliki posisi yang sama. Jika penelitian ini kemudian dikaitkan dengan model *Excellence Theory*, maka model keempat yaitu *two way symmetric* ialah model yang paling tepat dan ideal. Meskipun dalam pelaksanaanya masih ada berbagai hal yang menghambat disebabkan oleh beberapa faktor. Hambatan tersebut yaitu hambatan secara teknis, hambatan

semantic, dan hambatan manusiawi yang diakibatkan dari beberapa bentuk emosi dan prasangka pribadi (Karlina Gusmarani, Rajiyem, 2022).

Menurut Dozier, Grunig dan Grunig (10:1995), dalam *Excellence Theory* terdapat komponen yang menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah tujuan yakni tercapainya *excellence communication*. Dimana komponen tersebut meliputi *knowledge core*, *shared expectation* serta *participative culture*.



Sumber : Jurnal Ilmu Komunikasi

Gambar 2.1 Komponen *Excellence Theory*

1. *Knowledge core*, komponen ini terdiri dari dua hal yang berbeda. Pertama, merupakan suatu aktivitas seperti mengedit, menulis, ataupun dengan aktivitas teknis yang lainnya. Kedua, sebuah aktivitas komunikasi yang bersifat strategis. Hal tersebut dapat berupa memberikan saran masukan saat berkomunikasi atau menanggapi sebuah isu dengan komunikasi dua arah yang asimetrik (*two way asymmetric*) atau komunikasi dua arah simetris (*two way symmetric*)

symmetric) disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh kehumasan.

2. *Shared Expectations*, merupakan top communicator dari Humas yang mampu membangun kerjasama dengan komunikasi untuk menciptakan program untuk tercapainya *excellence communication* yang bersifat teknis atau strategis.
3. *Participative culture*, lingkaran terluar yang melekat dengan *knowledge core* dan *shared expectation*. *Participative culture* merupakan suatu pemahaman untuk dapat mendukung satu sama lain menuju harapan bersama. Hal tersebut akan tercapai secara maksimal dengan adanya budaya partisipatif dalam sebuah organisasi.

2.3 Definisi Konseptual

2.2.1. Strategi Komunikasi Internal

Strategi komunikasi internal merupakan rangkaian pemahaman tugas pokok dan fungsi sekaligus dapat mengatasi keluhan dalam menyebarkan sebuah informasi di lapangan. Selain itu, Harold D Laswell dengan pernyataannya yang berbunyi “*who says what which what channel to whom with what effect*”, ini merupakan suatu strategi komunikasi yang bersifat nyata. Perlunya perhatian lebih dalam memilih komunikator

dalam menyusun informasi, memilih media komunikasi dan effect yang akan ditimbulkan.

Terdapat keterkaitan antara strategi komunikasi dengan tujuan yang akan dicapai dalam menghadapi isu yang sedang berkembang. Dijelaskan dalam buku yang ditulis oleh R. Wayne Pce, Brent D. Peterson, serta M. Dallas Burrent yang berjudul “*Tecniques foe effective Communication*” (Abidin, 2015). Bahwa ada tiga tujuan pokok dari sebuah proses komunikasi yaitu:

1. *To secure understanding*, untuk meyakinkan bahwa komunikan dapat memahami isi pesan yang didupatkannya.
2. *To estabilish acceptance*, setelah menerima dan memahami isi pesan, maka tujuan selanjutnya penerima pesan dapat membimbing penerima pesan agar dapat menerima pesan tersebut.
3. *To motivate action*, hal ini dalam hal memotivasi komunikan agar mengambil suatu tindakan yang sesuai berdasarkan pesan dan informasi yang diterima.

2.2.2. Kamtibmas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mendefinisikan Kamtibmas sebagai kondisi dinamis

masyarakat yang menjadi prasyarat terselenggaranya pembangunan nasional. Kondisi ini ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang memungkinkan masyarakat untuk membina dan mengembangkan potensi dalam mencegah dan menanggulangi pelanggaran hukum serta gangguan lainnya yang meresahkan. Selain itu, penjelasan lain dikutip dari (Ningtyas 2022), kamtibmas adalah kondisi aman tanpa adanya gangguan, bahaya, rasa takut maupun risiko.

Kamtibmas merupakan kondisi yang harus tidak hanya diciptakan oleh aparat yang berwenang tetapi juga dengan kontribusi masyarakat dalam mencegah gangguan kamtibmas berupa kericuhan atau tindak kriminal yang menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dikutip dari (Irsan, 1997). Gangguan-gangguan kamtibmas yang sering terjadi dapat dibagi menjadi 3 sebagai berikut :

1. Gangguan Kamtibmas Konvensional, merupakan gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara umum.

2. Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, dimana pola dasar atau *pattern* yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat.
3. Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut, baik dari segi motivasinya, ancaman, maupun dari segi korbannya

2.2.3. Pilkada 2024

Pilkada 2024, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penyelenggaraan pemilihan umum baik Presiden, Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan secara serentak. Pada tahun 2024, pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Pilkada adalah proses demokratis di mana penduduk dari suatu daerah memilih pemimpin mereka secara langsung,

mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Definisi ini sejalan dengan yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Pilkada merupakan ruang partisipasi politik rakyat untuk mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah. Tujuan pilkada yaitu terpilihnya kepala daerah yang terpercaya, memiliki kemampuan, kepribadian, dan moral yang baik. Dengan demikian, pilkada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakatnya (Sinaga,2018).

2.2.4. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion ialah suatu upaya untuk mengumpulkan informasi dengan cara berdiskusi kelompok (Yunita & Nurul,2023). Kegiatan ini merupakan sebuah proses penghimpunan data mengenai suatu isu dengan cara diskusi kelompok (Bisjoe ,2018).

Karakteristik dari kegiatan *Focus Group Discussion* diantaranya adalah :

1. Menggunakan system wawancara yang bersifat terstruktur oleh sebuah kelompok individu yang dipandu oleh moderator (Careey,1994).
2. Individu bervariasi dengan jumlah 6 sampai 8 orang (Kitzinger, 1996)
3. Isu sosial yang dibahas oleh sekelompok individu bukanlah isu yang bersifat personal dan tidak merugikan siapapun. (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006).

2.4 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini menggunakan *Excellence Theory* merupakan salah satu model dalam komunikasi organisasi yang menjelaskan bahwa komunikasi yang efektif dalam organisasi harus berorientasi pada komunikasi dua arah yang simetris guna menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dalam organisasi maupun dengan pemangku kepentingan. Dicetuskan oleh James E. Grunig bersama koleganya, David M. Dozier, Larissa A. Grunig, dan William P. Ehling dalam sebuah buku “*Excellence in Public Relations and Communication Management*” yang kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam “*Excellence Public Relations and Effective Organizations*” oleh James E. Grunig dan Dozier tahun 2002.

Sesuai dengan teori ini, terdapat empat model komunikasi yang dapat digunakan untuk menganalisis bentuk komunikasi internal yang telah diterapkan Humas Polda Jawa Tengah :

1. *Press agentry atau Publicity*, menggunakan teknik persuasi untuk untuk mengajak publik agar dapat bersama mencapai tujuan sebuah organisasi.
2. *Public Information*, merupakan komunikasi yang bertugas menginformasikan aktivitas organisasi kepada publiknya.
3. *Two way asymmetry*, Adanya *feedback* yang digunakan untuk memberikan pesan atau informasi serta mengajak stakeholder untuk berperilaku sesuai dengan visi misi organisasi.
4. *Two way symmetric*, Berorientasi dalam terbentuknya hubungan jangka panjang dengan public atau stakeholder untuk selalu berpartisipasi supaya tercapainya pengertian bersama.

Penelitian ini mengkaji relevansi *Excellence Theory* untuk memahami penerapan strategi komunikasi internal Humas Polda Jawa Tengah apakah sudah mencapai bentuk ke empat dari model komunikasi menurut James E. Grunig. Dalam hal ini, Kegiatan *Focus Group Discussion* berfungsi sebagai wadah komunikasi internal Humas Polda Jawa Tengah selama masa Pilkada 2024.

2.5 Profil Instansi

2.5.1 Sejarah Humas Polda Jawa Tengah



Sumber : Dokumentasi Internal Humas Polda Jawa Tengah

Gambar 2.2 Kantor Humas Polda Jawa Tengah

Humas Polda Jawa Tengah yang merupakan bagian dari satker yang berada di Polda Jawa Tengah yang memiliki sejarah penting dalam mengelola segala bentuk informasi beserta dokumentasi mengenai penegakan hukum di Indonesia. Dimulai dari masa sebelum kemerdekaan ketika pemerintah kolonial Belanda mengelola berbagai bentuk pengawasan. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, struktur kepolisian disesuaikan dan pada tahun 1946, Polda Jawa Tengah resmi didirikan sebagai bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selama Orde Baru, Humas Polda Jawa Tengah berperan aktif dalam menjaga stabilitas informasi, komunikasi dan dokumentasi untuk dapat terorganisir baik melalui media sosial maupun melalui media massa. Humas Polda Jawa Tengah sebagai perantara

utama dalam menyampaikan sebuah informasi tentang Polri kepada berbagai media.

Humas Polda Jawa Tengah bertugas dalam menyelenggarakan fungsi Humas melalui perencanaan hingga penyebaran informasi ke berbagai media. Saat ini, Humas Polda Jawa Tengah terus beradaptasi dengan tantangan modern, seperti kejahatan siber, aktif melakukan kegiatan kehumasan yang berkaitan dengan instansi baik berupa konferensi pers atau publikasi konten melalui media. Dengan komitmen yang kuat untuk melayani masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan bangsa, Humas Polda Jawa Tengah tetap menjadi bagian dari institusi yang dinamis dan responsif terhadap situasi masyarakat.

Profil Humas Polda Jawa Tengah secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Nama Instansi	: Polda Jawa Tengah
Bidang	: Humas Polda Jawa Tengah
Kapolda	: Irjen Pol. Dr. Ribut Hari Wibowo, S.H., S.I.K., M.H.
Kabid	: Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si.
Alamat	: Jalan Pahlawan Nomor 1, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang

Selatan, Kota Semarang, Provinsi
Jawa Tengah 50142.

Telephone : (024) 8413544

2.5.2 Visi Misi Polda Jawa Tengah

Mendasari tugas pokok yang dijabarkan ke dalam visi dan misi untuk bersinergi dalam menghadapi seluruh tugas anggota Polda Jawa Tengah, sebagai berikut:

VISI

Dapat terciptanya Humas Polri yang semakin professional, transparan dan bertanggungjawab guna membangun kepercayaan sekaligus partisipasi publik di wilayah Jawa Tengah dengan mandiri, berdaulat serta memiliki semangat gotong royong.

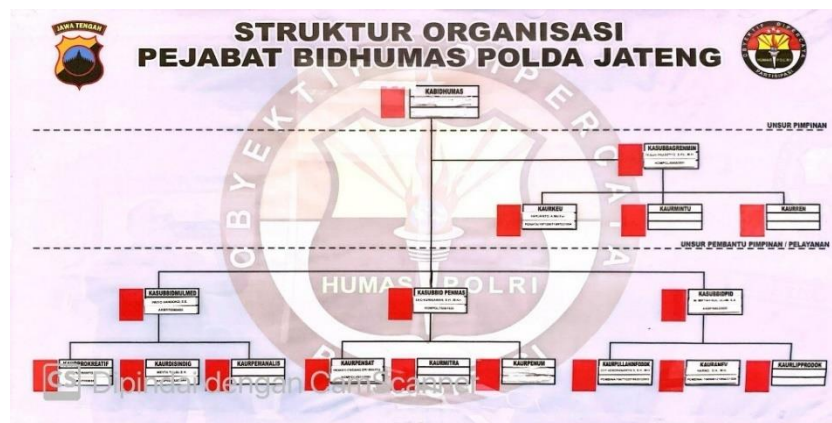
MISI

1. Sebagai pengayom, pelindung serta pelayan masyarakat.
2. Sebagai pelaksana penegakan hukum secara sifatnya transparan untuk memelihara kamtibmas.
3. Memberikan pelayanan prima untuk mendapatkan kepercayaan publik serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran hukum.

4. Berperan secara aktif dalam menciptakan kondisi yang aman serta kondusif dalam lingkungan masyarakat.
5. Selalu menjunjung tinggi HAM dalam setiap melaksanakan tugas Polri.

2.5.3 Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Polri, sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 14 Th. 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah, Berikut adalah Struktur Organisasi Humas Polda Jawa Tengah yang dipimpin oleh Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si.



Sumber : Dokumen Humas Polda Jawa Tengah

Gambar 2.3 Susunan Organisasi Polda Jawa Tengah

2.5.4 Tugas dan Fungsi Humas Polda Jawa Tengah

Telah tertulis dalam Peraturan Kapolri No. 14 Th. 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah

dalam melaksanakan tugas beserta fungsi Polri, Humas Polda Jawa Tengah dibagi menjadi beberapa bidang yaitu :

a. Sub Bidang Renmin (Perencanaan Administrasi)

Sub Bidang Renmin bertanggung jawab atas sebuah perencanaan kegiatan strategis dan mengelola berbagai urusan administrasi hubungan masyarakat.

b. Sub Bidang Penmas (Penerangan Masyarakat)

Sub Bidang Penmas merupakan unit operasional utama yang ada di Humas Polda Jawa Tengah yang bertugas membina dan mengoordinasikan kerja sama, menyebarluaskan informasi publik, dan menyediakan informasi unit untuk memudahkan penyebaran informasi ke seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, baik internal maupun eksternal, demi kepentingan masyarakat luas..

Sub Bidang Penmas menjalankan fungsi :

- a. Melaksanakan kegiatan Penum untuk membentuk opini publik.
- b. Upaya membentuk opini publik melalui berbagai media online.
- c. Melaksanakan kegiatan Pensat untuk memberikan segala informasi secara merata dalam lingkup internal Polda Jawa Tengah

- d. Memiliki peran dalam menjalin hubungan baik dengan media.
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan badan-badan lain sesuai dengan system pembinaan kehumasan.
- f. Penjalin kemitraan dengan media massa.
- g. Sebagai perantara dalam kegiatan pertukaran informasi dengan instansi Polri.
- h. Memberikan masukan kepada pimpinan terkait tugas dan fungsi Humas Polda Jateng
- i. Sebagai Pembantu Kabid Humas dalam melaksanakan tugasnya.

Selain itu, Subbid Penmas juga dibantu oleh Urusan Mitra yang bertanggungjawab melaksanakan kerjasama dengan lembaga kehumasan dalam dan luar negeri, serta penyediaan materi untuk opini positif tentang kegiatan di lingkungan Polda Jawa Tengah. Urusan Penerangan Umum memiliki tugas dan fungsi meliputi pengelolaan informasi publik, analisis opini masyarakat, dan kerjasama dengan wartawan untuk membentuk citra Polri. Sedangkan Urusan Penerangan Satuan bertugas dalam produksi dan distribusi informasi internal Polda Jawa Tengah.

c. Sub Bidang PID (Pengelola Informasi dan Dokumentasi)

Subbid PID merupakan unsur pelaksana utama Humas Polda Jawa Tengah yang bertugas menyelenggarakan, mengolah, mengumpulkan segala bentuk informasi serta dokumentasi Polda Jawa Tengah. Berikut ini adalah fungsi dari Sub Bidang PID :

- a. Sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkup Polda Jawa Tengah.
- b. Pengelola segala bentuk informasi dan dokumentasi yang masuk.
- c. Melakukan publikasi informasi serta dokumentasi yang telah sesuai dengan ketentuan.
- d. Pengumpul segala informasi serta data yang berhubungan dengan kegiatan di Polda Jawa Tengah.
- e. Penyediaan segala bentuk informasi yang akurat.
- f. Penyiapan materi untuk pimpinan.
- g. Mendokumentasikan informasi dalam bentuk gambar, video,serta audio sesuai dengan kebutuhan instansi.
- h. Pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.
- i. Melakukan monitoring mengenai pelayanan dan penegakkan hukum Polda Jawa Tengah melalui system informasi pengaduan public complain.

Subbid PID didukung oleh tiga unit utama dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Urusan Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (Pullah Infodok) yang bertanggung jawab menyediakan informasi publik terkait kinerja Polda Jawa Tengah, menghimpun data, serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Urusan Liputan, Produksi, dan Dokumentasi (Lipprodok) yang berperan dalam peliputan dan pendokumentasian kegiatan Polda Jateng dalam berbagai format, serta melakukan monitoring dan evaluasi berita media elektronik. Sementara itu, Urusan Monitoring (Ur Monitoring) bertugas memantau kegiatan operasional dan prestasi Polda Jawa Tengah melalui berbagai media untuk kepentingan evaluasi dan pelaporan.

d. Sub Bidang Mulmed (Multimedia)

Sub Bidang Multimedia adalah unsur pelaksana Humas Polda Jawa Tengah yang bertugas dalam mengolah suatu isu dalam media digital maupun media elektronik. Selain itu, melakukan kegiatan publikasi informasi melalui berbagai media.

Dalam menjalankan tugasnya, Subbid Multimedia memiliki beberapa fungsi yaitu :

- a. Membuat konten kreatif dalam bentuk, foto, visual audia, atau iklan layanan masyarakat dengan penjadwalan penayangan yang sudah diatur.
- b. Pelaksanaan monitoring media.
- c. Melakukan kegiatan diseminasi informasi melalui media digital untuk kepentingan tugas Polda Jawa Tengah.

Subbid Multimedia dibantu oleh tiga unit utama dalam menjalankan tugasnya. Urusan Produksi Kreatif (Urprodukkreatif) bertanggung jawab meningkatkan citra Polti dengan membuat konten kreatif postingan, *storyboard*, produk multimedia inspiratif. Urusan Penganalisis (Urpemanalis) melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada seluruh media serta mengelola media untuk mendukung tugas Polri. Sementara itu, Urusan Diseminasi Digital (Urdisindig) berperan dalam menyebarkan program kampanye digital melalui pendekatan humanis melalui berbagai media.